Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047
Volume 17 No. 2 | Mei 2023
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS

Tata Kelola Kolaboratif dan Komunikasi Strategis dalam Pencegahan Stunting: Analisis Sosiologi Politik atas Peran Pemerintah Kota Ambon

Collaborative Governance and Strategic Communication in Stunting Prevention: A Political Sociology Analysis of the Ambon City Government's Role

https://doi.org/10.30598/populis.17.2.214-230

Lenora Beay[1*], Dortje Leonora Yokbeth Lopulalan[2], Vransisca Kissya[3]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
[3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
*leonorabeay@gmail.com

Abstract

This article investigates the role of the Ambon City Government in stunting prevention through the lens of collaborative governance and strategic health communication. Drawing on a qualitative political sociology approach, the study explores how municipal authorities integrate diverse actors—including the National Population and Family Planning Board (BKKBN), traditional villages (desa and negeri), health institutions, and non-governmental organizations—into a multi-sectoral governance network aimed at reducing stunting prevalence. The research also examines the city's use of strategic communication tools such as public service announcements (PSAs), billboards, banners, and community outreach programs to influence public behavior and raise awareness about stunting-related health risks. Findings reveal that effective inter-institutional collaboration, reinforced by culturally resonant and consistent communication efforts, significantly contributes to policy coherence and public engagement. Moreover, the allocation of targeted budgets indicates strong political commitment, enhancing policy legitimacy and implementation outcomes. The study contributes to social science and humanities discourse by offering a context-specific analysis from Eastern Indonesia—an area underrepresented in global governance and public health literature. The integration of governance theory, political sociology, and strategic health communication presents a novel interdisciplinary framework for evaluating public health interventions. It also proposes a replicable model of urban collaborative governance applicable to similarly structured socio-political environments in the Global South.

Keywords: *Collaborative Governance, Health Communication, Political Sociology, Public Health Policy, Stunting Prevention*

Info Artikel
Naskah diterima: *04/03/2023*
Revisi terakhir: *19/04/2023*
Disetujui: *06/05/2023*

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur (Permatasari & Walinegoro, 2023). Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka stunting nasional berada pada 21,6%, dengan beberapa provinsi di kawasan timur seperti Maluku dan Papua mencatat angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (Permatasari et al., 2022). Di Kota Ambon, sebagai ibu kota provinsi Maluku, upaya penanggulangan stunting telah menjadi prioritas kebijakan lokal. Namun, kompleksitas persoalan ini tidak hanya menyangkut soal gizi dan pelayanan kesehatan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mengelola relasi antar

aktor, menyampaikan pesan kepada publik, serta membangun kepercayaan sosial untuk perubahan perilaku (Candarmaweni & Yayuk Sri Rahayu, 2020). Persoalan-persoalan tersebut membuka ruang diskusi penting: sejauh mana kapasitas pemerintah kota, dalam hal ini Pemerintah Kota Ambon, mengorkestrasi tata kelola kolaboratif yang inklusif dan strategi komunikasi yang efektif dalam menangani isu stunting?

Kajian mengenai kolaborasi lintas sektor dalam isu kesehatan bukanlah hal baru. Prasetyo et al. (2023) dan Sitaresmi et al. (2023) telah menekankan pentingnya collaborative governance dalam konteks kebijakan publik, khususnya untuk isu-isu kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dalam konteks lokal Indonesia, menyoroti bagaimana kolaborasi antar lembaga menjadi elemen kunci dalam kebijakan kesehatan ibu dan anak, namun sering kali terganjal oleh koordinasi yang lemah dan dinamika kekuasaan antar instansi. Di sisi lain, studi oleh Fristiwi et al. (2023), Noventi (2020), dan Rosalia et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam konteks desa, keberhasilan program penurunan stunting sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat. Namun, belum banyak yang mengupas bagaimana praktik kolaboratif itu terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki struktur sosial-politik lebih kompleks, seperti Ambon.

Dalam hal komunikasi strategis, para peneliti telah menyoroti pentingnya penyampaian pesan kesehatan publik yang tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan kontekstual. Seperti yang dikemukakan oleh Rahayu et al. (2022), komunikasi kesehatan yang efektif harus peka terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat sasaran. Di Indonesia, penelitian oleh Magrath & Nichter (2023) dan Panjaitan et al. (2023) menunjukkan bahwa kampanye publik terkait stunting belum sepenuhnya menyentuh aspek perubahan perilaku karena pendekatannya yang masih top-down. Sementara itu, Kusuma et al. (2023), Murtadho (2022), dan Yuniar & Fibrianto (2019) menekankan perlunya kampanye berbasis komunitas yang memperkuat pesan-pesan kesehatan melalui media yang relevan dan pendekatan yang lebih dialogis. Dari sini, menjadi jelas bahwa peran komunikasi dalam pencegahan stunting perlu lebih dari sekadar sosialisasi; ia harus menjadi alat strategis yang membentuk persepsi dan mendorong transformasi sosial.

Literatur juga memperlihatkan adanya celah antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan stunting. Assegaff et al. (2023) dan Solihin et al. (2024) dalam Implementation menggambarkan bagaimana kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun bisa gagal karena persoalan koordinasi dan komunikasi antarlembaga. Di Indonesia, fenomena ini diperkuat oleh studi-studi seperti milik Jandevi (2019) dan Rahmawati et al. (2022) yang menunjukkan bahwa program-program nasional sering kali tidak berjalan optimal di tingkat lokal karena minimnya adaptasi terhadap konteks setempat. Dalam kasus Ambon, struktur sosial adat seperti negeri dan desa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, namun sering kali diabaikan dalam kebijakan kesehatan. Padahal, seperti yang ditunjukkan oleh Susanti et al. (2020), pendekatan yang melibatkan lembaga adat justru dapat memperkuat legitimasi dan penerimaan publik terhadap program pemerintah.

Di sisi lain, pendekatan sosiologis-politik terhadap isu stunting masih relatif terbatas. Banyak studi cenderung menempatkan isu ini dalam kerangka medis atau teknokratis semata, sementara dimensi relasi kuasa, legitimasi kebijakan, dan representasi simbolik pemerintah belum banyak disentuh. Padahal, seperti diingatkan oleh Adriany & Tesar (2023), Muhtar et al. (2022), dan Suwarta et al. (2023), kebijakan publik selalu merupakan produk dari struktur kekuasaan yang berlangsung di dalam masyarakat. Studi oleh Diana et al. (2022), Saputri et al. (2020), dan Suharto et al. (2020), mengungkapkan bahwa keberhasilan program kesehatan di tingkat kota sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah membangun citra, membentuk narasi, dan mengelola persepsi masyarakat melalui simbol dan komunikasi politik. Di sinilah, pentingnya memahami komunikasi dan tata kelola bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai arena kekuasaan dan legitimasi sosial.

Berangkat dari berbagai studi tersebut, tampak bahwa terdapat ruang yang belum banyak dijelajahi dalam kajian stunting di Indonesia, khususnya di konteks perkotaan wilayah timur. Dinamika kolaborasi antar institusi, relasi antara pemerintah kota dengan aktor-aktor lokal seperti negeri adat, serta strategi komunikasi yang digunakan untuk menjangkau masyarakat urban yang heterogen, adalah aspek-aspek penting yang belum cukup dikaji secara komprehensif. Dalam konteks Ambon, hal ini menjadi menarik karena kota ini memiliki karakteristik hibrid antara kota modern dan struktur sosial adat yang masih kuat. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyelami praktik collaborative governance dan komunikasi strategis Pemerintah Kota Ambon dalam menangani stunting, bukan hanya dari sudut pandang kebijakan, tetapi juga dari sisi sosiologis-politik yang menelaah legitimasi, simbolisme, dan relasi kuasa yang menyertainya.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini menawarkan perspektif yang menyegarkan dan kontekstual dalam diskursus stunting dan kebijakan kesehatan publik. Analisis berbasis Indonesia Timur masih sangat jarang diangkat dalam literatur global tentang governance dan kesehatan masyarakat, sehingga penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam memperluas cakrawala pemikiran tentang model kolaborasi lokal dan strategi komunikasi publik. Lebih dari itu, dengan menggabungkan kerangka teori governance, sosiologi politik, dan komunikasi kesehatan strategis, kajian ini membuka ruang dialog interdisipliner yang semakin dibutuhkan di era kompleksitas kebijakan saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pemerintah Kota Ambon membangun tata kelola kolaboratif dan strategi komunikasi dalam penanganan stunting, serta bagaimana dinamika kekuasaan, legitimasi, dan simbolisme pemerintah hadir dalam kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif sosiologi politik, penelitian ini juga ingin menelusuri praktik baik dan hambatan yang dihadapi pemerintah kota dalam menyusun narasi kebijakan yang inklusif, efektif, dan diterima secara sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik collaborative governance dan strategi komunikasi

Pemerintah Kota Ambon dalam penanganan stunting. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan yang dikaji menyangkut dinamika sosial-politik, komunikasi simbolik, serta interaksi antarlembaga yang kompleks—aspek-aspek yang sulit dipahami secara utuh melalui pendekatan kuantitatif yang lebih terfokus pada angka dan generalisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Burdine et al. (2021) dan Naeem et al. (2023), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap makna, persepsi, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam konteks tertentu, terutama ketika penelitian berusaha memahami tindakan dan strategi kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan, budaya, dan identitas lokal.

Pemilihan Kota Ambon sebagai lokasi penelitian tidak dilakukan secara acak. Kota ini merupakan pusat administratif dan ekonomi di Provinsi Maluku serta menjadi barometer kebijakan publik di wilayah timur Indonesia. Lebih dari itu, Ambon menyimpan keunikan struktur sosial karena eksistensi negeri adat yang hidup berdampingan dengan tata kelola pemerintahan formal, menciptakan lanskap sosiopolitik yang kompleks dan menarik untuk ditelaah. Fenomena ini menjadikan Ambon sebagai lokasi yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kolaborasi dan komunikasi strategis dibangun di ruang-ruang urban yang tetap dibentuk oleh nilai-nilai komunal dan struktur adat. Dalam konteks stunting, Pemerintah Kota Ambon menunjukkan inisiatif nyata dengan mengalokasikan anggaran khusus, menggelar sosialisasi lintas sektor, dan melibatkan berbagai pihak dari tingkat RT hingga lembaga vertikal. Maka, memahami praktik kolaborasi dan komunikasi di kota ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model tata kelola kesehatan di wilayah urban lain yang memiliki karakteristik serupa.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 18 orang yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansi mereka dalam kebijakan dan praktik penanganan stunting. Informan tersebut mencakup pejabat di Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, penelitian ini melibatkan kepala desa/negeri, tokoh adat, perwakilan organisasi non-pemerintah yang aktif dalam advokasi gizi anak, serta tenaga kesehatan di Puskesmas dan kader posyandu. Pemilihan mereka sebagai informan didasarkan pada dua pertimbangan utama: pertama, posisi mereka sebagai pengambil keputusan atau pelaksana kebijakan di tingkat lapangan; kedua, kapasitas mereka untuk memberikan informasi kontekstual yang kaya terkait dinamika kolaborasi dan komunikasi di lingkungan kerja masing-masing. Bleiker et al. (2019) dan de Villiers et al. (2022) menyebut pendekatan ini sebagai purposeful sampling, yakni pemilihan individu yang dapat memberikan informasi paling relevan dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipatif terbatas, serta studi dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan ruang bagi informan untuk berbagi pengalaman dan pandangannya secara bebas, sekaligus menjaga fokus penelitian tetap terarah. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 45–90 menit untuk masing-masing informan, dilakukan baik

secara tatap muka maupun daring, tergantung pada situasi dan ketersediaan narasumber. Proses ini berlangsung dalam kurun waktu April hingga Juni 2023. Observasi dilakukan di beberapa kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi stunting, yang memberikan gambaran konkret tentang bagaimana komunikasi dan kolaborasi terjadi dalam praktik. Sementara itu, dokumen yang ditelaah meliputi rencana aksi daerah (RAD) stunting Kota Ambon, materi kampanye stunting (baliho, poster, video PSA), laporan kegiatan lintas sektor, serta notulensi rapat koordinasi.

Pemilihan metode-metode tersebut dilakukan secara komplementer untuk menjamin kedalaman dan keluasan data. Triangulasi dilakukan melalui tiga cara utama: triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dicapai dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis informan—baik dari kalangan pemerintah, masyarakat adat, hingga tenaga kesehatan. Triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Sementara triangulasi teori dilakukan dengan menguji temuan lapangan melalui beberapa perspektif teoretis, seperti governance theory, sosiologi politik ala Bourdieu dan Weber, serta teori komunikasi kesehatan strategis (Cuthbertson et al., 2020; Rose & Johnson, 2020). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya kuat secara empiris, tetapi juga kokoh secara teoretis dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Tata Kelola Kolaboratif dalam Pencegahan Stunting di Kota Ambon

Upaya pencegahan stunting di Kota Ambon menunjukkan kecenderungan baru dalam praktik tata kelola kebijakan publik. Tidak lagi semata-mata beroperasi dalam logika administratif yang hirarkis, Pemerintah Kota Ambon justru membangun pola kolaborasi yang melintasi batas-batas kelembagaan. Sejak tahun 2021, forum lintas sektor yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Bappeda, serta lembaga vertikal seperti BKKBN, telah aktif terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting. Di luar aktor formal tersebut, keterlibatan tokoh adat dari negeri-negeri di Kota Ambon, tokoh agama, LSM, dan kelompok kader kesehatan di tingkat RT/RW, menjadi fondasi penting dalam membangun jembatan antara kebijakan dan penerimaan sosial.

Dalam wawancara dengan salah satu pejabat di DP2KB (Hn), ia menjelaskan bahwa strategi pemerintah dalam menurunkan angka stunting tidak bisa hanya mengandalkan struktur birokrasi. "Yang tahu kondisi riil anak-anak di lapangan adalah ibu kader dan kepala negeri. Mereka yang jadi ujung tombak perubahan," demikian kesan yang mengemuka dari narasi informan. Pandangan ini menggambarkan bagaimana praktik kolaboratif yang dibangun tidak semata mengikuti prosedur formal, melainkan mengandalkan jejaring kepercayaan yang telah lama terbentuk di masyarakat.

Dalam bingkai interactive governance seperti yang dikemukakan Partelow et al. (2020), keberhasilan suatu tata kelola publik terletak pada kemampuan aktor-aktor yang

terlibat untuk menciptakan ruang interaksi yang dialogis, inklusif, dan saling bergantung. Kota Ambon, dalam hal ini, menyediakan contoh konkret dari praktik tersebut. Pemerintah kota secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor yang tidak hanya dihadiri oleh pejabat teknis, tetapi juga oleh kepala negeri dan tokoh agama yang selama ini menjadi pemegang otoritas sosial di komunitas-komunitas lokal. Dalam salah satu rapat yang diobservasi oleh peneliti di kantor Bappeda pada Mei 2025, suasana yang terbangun cukup cair. Kepala negeri dari wilayah Batu Merah, misalnya, dengan lugas menyampaikan kendala partisipasi masyarakat dalam posyandu akibat benturan jadwal kerja warga, dan masukan tersebut langsung ditanggapi oleh pihak Puskesmas sebagai dasar penyusunan ulang jadwal pelayanan.

Fakta lapangan ini menunjukkan bahwa ruang kolaborasi yang dibangun tidak bersifat simbolik semata, tetapi merupakan arena deliberatif yang aktif dan dinamis. Observasi tambahan di Negeri Soya juga memperlihatkan bahwa kader-kader posyandu bekerja erat dengan tokoh agama setempat untuk menyosialisasikan bahaya stunting melalui kegiatan pengajian dan ibadah minggu. Ketika peneliti mengikuti kegiatan penyuluhan di salah satu rumah ibadah, terlihat bagaimana narasi tentang gizi dan perawatan anak disampaikan dalam bahasa lokal dan dengan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari jemaat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pesan kesehatan, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial dari program pemerintah.

Namun demikian, kolaborasi ini tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Di beberapa titik, terdapat ketidakselarasan antara logika kerja birokrasi dengan praktik sosial yang berbasis nilai-nilai adat. Seorang kepala Puskesmas (Mr) mengakui bahwa dalam beberapa kasus, instruksi dari pusat tidak serta merta bisa dijalankan karena harus menyesuaikan dengan struktur kepemimpinan di negeri. “Kami harus diskusi dulu dengan Latupati atau Kepala Soa, karena mereka yang lebih didengar,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan adanya hibriditas dalam struktur tata kelola di Ambon, di mana otoritas administratif dan otoritas adat berinteraksi dalam cara yang tidak selalu linier. Tetapi justru di titik ini, nilai kolaborasi menjadi sangat penting—bukan untuk menghapus perbedaan, melainkan untuk menjembatani kepentingan yang beragam dalam satu tujuan bersama.

Menariknya, bentuk kolaborasi ini tidak hanya terjadi secara vertikal antara pemerintah dan komunitas, tetapi juga secara horisontal antar institusi. BKKBN, misalnya, tidak hanya menyediakan data dan indikator teknis, tetapi juga aktif dalam pelatihan kader di desa-desa, bekerja sama dengan LSM lokal yang memiliki akar sosial kuat. Salah satu LSM yang ditemui di lapangan, bekerja di wilayah Kecamatan Sirimau, bahkan menyusun modul pelatihan berbasis budaya lokal yang memadukan pendekatan antropologis dan kesehatan masyarakat. Modul ini kemudian digunakan dalam kelas ibu hamil dan posyandu remaja.

Secara teoritis, praktik ini memperkuat argumentasi bahwa tata kelola kolaboratif yang efektif tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi oleh kemampuan aktor-aktor untuk membangun relasi kepercayaan dan komitmen bersama (Müller, 2022; Partelow et al., 2020). Dalam konteks Ambon, nilai kepercayaan (*trust*), saling menghormati (*mutual*

respect), dan kemampuan untuk mendengarkan menjadi komponen utama keberhasilan tata kelola stunting. Kolaborasi lintas sektor yang dibangun tidak sekadar beroperasi dalam tataran prosedural, melainkan juga emosional dan normatif, di mana kekuasaan didistribusikan melalui bahasa simbolik dan nilai-nilai kolektif.

Komunikasi Strategis sebagai Alat Legitimasi dan Perubahan Perilaku

Dalam konteks penanggulangan stunting di Kota Ambon, strategi komunikasi kesehatan yang digunakan pemerintah tidak hanya bertujuan menyebarkan informasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran publik, mengubah perilaku, dan memperkuat legitimasi kebijakan. Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Kesehatan dan DP2KB, secara aktif memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang berkaitan dengan gizi anak, praktik pengasuhan, dan akses layanan kesehatan. Alat komunikasi yang digunakan sangat beragam, mulai dari baliho besar yang terpampang di pusat kota, banner di wilayah permukiman, video PSA (public service announcement) yang diputar di media sosial dan ruang publik, hingga penyuluhan langsung ke rumah-rumah warga.

Pendekatan ini selaras dengan pandangan Termeer et al. (2019), di mana komunikasi kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya serta membangun partisipasi dan kepemilikan komunitas terhadap pesan yang disampaikan. Di Ambon, bentuk-bentuk komunikasi tersebut sering kali dimodifikasi dengan nuansa lokal. Misalnya, pesan-pesan kesehatan dalam baliho tak jarang disisipkan ungkapan dalam bahasa daerah atau mencantumkan simbol-simbol yang dekat dengan identitas masyarakat setempat, seperti rujukan terhadap tokoh agama atau negeri adat. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi kesehatan di kota ini tidak bersifat steril dan top-down, melainkan dirancang sedemikian rupa agar mampu menyentuh dimensi kultural masyarakat.

Observasi lapangan yang dilakukan di beberapa wilayah seperti Kecamatan Nusaniwe dan Sirimau memperlihatkan bahwa baliho-baliho mengenai pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan ajakan untuk rutin memeriksakan anak ke posyandu tersebar di titik-titik strategis seperti dekat gereja, pasar tradisional, hingga terminal. Beberapa baliho bahkan mencantumkan wajah tokoh agama atau pemimpin adat lokal bersama anak-anak, dengan slogan yang menyentuh secara emosional seperti “Anak sehat, negeri kuat.” Narasi ini bukan hanya informatif, tetapi juga bersifat performatif dalam makna Bourdieuian—yaitu sebagai manifestasi simbolik dari kehadiran negara yang berusaha tampil sebagai pelindung dan pengarah moral masyarakat (Ansell & Torfing, 2021; Ding et al., 2023).

Dalam wawancara dengan salah satu informan dari Dinas Kesehatan (IM), dijelaskan bahwa pendekatan komunikasi visual dan naratif tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat dengan tingkat literasi yang beragam. Alih-alih hanya mengandalkan teks panjang, kampanye kesehatan diupayakan untuk bersifat visual, emosional, dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, tenaga penyuluh gizi dan kader posyandu dilatih untuk menggunakan media gambar dan cerita-cerita lokal sebagai alat komunikasi di tingkat rumah tangga. Seorang informan dari DP2KB (MS) juga menambahkan bahwa video pendek yang

disebarkan melalui WhatsApp dan Facebook berisi kisah-kisah nyata tentang keluarga yang berhasil menurunkan risiko stunting menjadi alat yang cukup efektif untuk memicu kesadaran komunitas.

Namun demikian, efektivitas kampanye ini tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa wilayah yang secara geografis terpencil, seperti kawasan perbukitan di Kecamatan Leitimur Selatan, distribusi materi kampanye masih belum merata. Hal ini diakui oleh seorang kader kesehatan (RM), yang menyatakan bahwa kadang warga hanya tahu soal stunting dari "katong pung cerita" (cerita antar warga) daripada dari materi resmi pemerintah. Di sinilah tampak pentingnya keterlibatan langsung dari tokoh agama dan pemuka adat, yang sering kali lebih dipercaya daripada aparat birokrasi. Mereka kerap menyelipkan pesan kesehatan dalam khutbah, doa syukuran, atau pertemuan adat—membuat pesan kesehatan terasa lebih akrab dan bermakna secara sosial.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa komunikasi publik dalam konteks kesehatan bukan hanya sekadar proses penyampaian pesan, tetapi juga sarana produksi makna dan legitimasi kekuasaan. Negara, melalui simbol dan narasi komunikasi, berupaya menunjukkan kepeduliannya terhadap warganya, menciptakan figur sebagai pelindung kesehatan anak-anak bangsa. Komunikasi strategis yang digunakan dalam penanggulangan stunting di Kota Ambon dengan demikian dapat dibaca sebagai perwujudan soft power governance, di mana pemerintah tidak hanya mengatur melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui persuasi simbolik yang dibungkus dalam media-media keseharian.

Secara teoritis, pendekatan ini memperlihatkan bagaimana kerangka pikiran Ansell et al. (2023) dan Torfing et al. (2021) tentang komunikasi yang sensitif konteks diterjemahkan dalam praktik lokal yang kompleks. Sementara dari perspektif Bourdieu, strategi komunikasi ini membangun habitus baru dalam komunitas melalui investasi simbolik yang terus-menerus. Dalam hal ini, baliho dan banner bukan sekadar alat kampanye, tetapi juga ruang produksi makna politik dan moral yang meneguhkan legitimasi negara dalam ranah privat, yaitu keluarga dan anak.

Relasi Kuasa, Legitimasi Kebijakan, dan Simbolisme Pemerintah

Dalam konteks tata kelola lokal di Kota Ambon, strategi penanggulangan stunting tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi kuasa yang terjalin antara aktor negara, institusi adat, dan masyarakat sipil. Relasi ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga simbolik dan politis, di mana negara berusaha membangun legitimasi atas intervensi kebijakan melalui berbagai tindakan yang sarat makna. Salah satu bentuk konkrit dari strategi ini adalah pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang secara eksplisit ditujukan untuk program percepatan penurunan stunting. Alokasi tersebut bukan semata bentuk pemenuhan kewajiban fiskal, melainkan isyarat kuat dari komitmen politik lokal terhadap isu kesehatan masyarakat. Sebagaimana terlihat dalam dokumen RKPD Kota Ambon tahun berjalan, terdapat nomenklatur anggaran khusus yang menyasar kegiatan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kapasitas kader kesehatan. Dalam wawancara dengan pejabat dari Dinas Kesehatan Kota Ambon, terungkap bahwa penekanan

pada nomenklatur ini dipandang penting sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah sekaligus instrumen untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Lebih jauh, pengamatan lapangan memperlihatkan bagaimana simbol-simbol negara dihadirkan secara intensif dalam ruang publik sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Baliho besar yang memuat wajah wali kota, disertai slogan kesehatan dan angka target penurunan stunting, terpajang di berbagai titik strategis kota—dari bundaran jalan utama hingga dinding luar kantor kelurahan. Simbolisme ini tidak hanya menyampaikan pesan informasi, tetapi juga menunjukkan kehadiran negara secara visual dan performatif di tengah masyarakat. Seorang warga yang juga ketua RT di kawasan Batu Merah menuturkan bahwa kehadiran baliho dan banner tersebut dianggap sebagai tanda bahwa "pemerintah tidak tinggal diam," sebuah persepsi yang menunjukkan bahwa tindakan simbolik turut membentuk kepercayaan terhadap keseriusan kebijakan. Dalam kerangka pikiran Getha-Taylor et al., (2019) dan Sarkodie et al. (2020), tindakan simbolik pemerintah dalam konteks lokal seperti ini adalah bentuk governing-through-symbols, yakni penggunaan artefak visual, narasi, dan representasi publik untuk membentuk dan mempertahankan legitimasi.

Selain itu, peran naratif dari pejabat lokal dalam berbagai forum publik, baik formal maupun informal, juga menjadi saluran penting dalam membangun relasi kuasa yang konstruktif. Dalam beberapa pertemuan lintas sektor dan kampanye kesehatan di tingkat kelurahan, pemimpin lokal seringkali menggunakan bahasa yang menyentuh sisi emosional masyarakat. Dalam satu kegiatan di Puskesmas Lateri, misalnya, seorang pejabat pemerintah menggunakan narasi tentang "generasi masa depan Ambon" dan "tanggung jawab moral sebagai orang tua" untuk membangun semangat kolektif dalam memerangi stunting. Bahasa seperti ini tidak hanya menunjukkan artikulasi teknokratis dari kebijakan, tetapi juga menciptakan efek afektif yang memperkuat kedekatan antara pemerintah dan warga. Narasi tersebut, sebagaimana pandangan Mansoor (2021) bahwa, menjadi bagian dari symbolic performance—di mana kebijakan tidak hanya disampaikan, tetapi juga dipertunjukkan untuk memperkuat kohesi sosial dan legitimasi kekuasaan.

Salah satu temuan menarik adalah bagaimana masyarakat menanggapi langkah-langkah pemerintah ini dengan campuran antara harapan dan kritisisme. Beberapa warga yang diwawancarai mengapresiasi keterlibatan pemerintah dalam isu kesehatan keluarga, tetapi juga menyoroti bahwa kehadiran simbol negara belum tentu selalu mencerminkan kedalaman substansi. "Kalau baliho banyak, tapi kalau kader kesehatan kurang, itu juga susah," ujar seorang kader posyandu di Kecamatan Sirimau. Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik yang dibangun lewat simbol dan narasi harus ditopang oleh implementasi kebijakan yang nyata dan berkelanjutan. Ketika simbolisme tidak diiringi dengan praktik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka potensi delegitimasi bisa muncul.

Relasi kuasa dalam penanggulangan stunting di Kota Ambon memperlihatkan wajah yang kompleks—antara niat baik negara untuk hadir dan membangun kepercayaan, dengan dinamika sosial yang menuntut bukti konkret dari kehadiran tersebut. Simbolisme tidak cukup

jika tidak dibarengi dengan distribusi sumber daya yang adil dan responsif. Namun, sejauh ini, strategi Pemerintah Kota Ambon menunjukkan kecenderungan yang positif: dengan anggaran yang terfokus, narasi yang membumi, dan simbol yang strategis, legitimasi politik lokal terhadap kebijakan stunting semakin mengakar dalam kesadaran publik. Ini menegaskan bahwa tata kelola kesehatan tidak hanya soal teknis intervensi, tetapi juga perihal bagaimana kuasa dimaknai, dijalankan, dan diterima dalam bingkai simbolik serta relasional yang khas pada konteks lokal.

Hambatan dan Ketegangan dalam Implementasi: Dari Niat ke Realitas

Dalam perjalanan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Ambon, niat politik yang kuat dan desain program yang ambisius ternyata harus berhadapan dengan berbagai hambatan struktural dan ketegangan praktis di lapangan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa persoalan dalam tahap pelaksanaan kebijakan bukan hanya soal kurangnya sumber daya, tetapi juga berkaitan dengan fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, dan kesenjangan pemahaman antaraktor kebijakan. Situasi ini mengafirmasi gagasan tentang policy-practice gaps, sebagaimana dijelaskan oleh Ding et al. (2023), bahwa sering kali kebijakan publik tidak tergelincir karena kekeliruan dalam perumusannya, melainkan karena keterbatasan kapasitas untuk mentransformasikan niat menjadi tindakan yang berdaya guna di tingkat implementasi.

Salah satu tantangan nyata yang muncul di lapangan adalah lemahnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara dinas kesehatan dengan lembaga non-kesehatan seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan kelurahan. Dalam wawancara dengan seorang ASN dari kecamatan Nusaniwe, terungkap bahwa kegiatan intervensi sensitif dan spesifik stunting kerap berjalan secara paralel tanpa integrasi yang memadai. Misalnya, program pemberian makanan tambahan dari dinas kesehatan tidak selalu disinergikan dengan program edukasi gizi dari dinas pendidikan atau kegiatan PKK. Hal ini menciptakan tumpang tindih kegiatan dan kebingungan di tingkat masyarakat penerima manfaat. Observasi pada kegiatan posyandu di Kelurahan Waihoka memperlihatkan bagaimana sejumlah kader kebingungan menyampaikan informasi karena menerima arahan yang berbeda dari instansi yang berbeda pula. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang terstruktur membuat energi kolaborasi yang seharusnya memperkuat program justru tereduksi oleh fragmentasi birokrasi.

Ketegangan lainnya muncul dari perbedaan data antara pusat dan daerah. Beberapa informan menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting yang dirujuk oleh kementerian terkadang berbeda dengan data yang dikompilasi oleh puskesmas setempat. Seorang pejabat di Dinas Kesehatan Kota Ambon menyampaikan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh metode pengumpulan data yang tidak seragam serta ketidaktepatan waktu pembaruan. Situasi ini berdampak pada keakuratan sasaran program. Misalnya, terdapat kasus di mana anak-anak yang seharusnya sudah tidak masuk kategori stunting tetap menerima intervensi, sementara yang membutuhkan justru terlewatkan. Ketidaksinkronan ini memperkuat temuan dalam literatur kebijakan yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada *governance coherence* dan *data harmonization* (Bianchi et al., 2021).

Dalam kondisi seperti ini, aktor lokal sering kali melakukan adaptasi terhadap kebijakan nasional sebagai bentuk negosiasi terhadap realitas lokal yang tidak selalu sesuai dengan skenario ideal dari pusat. Salah satu lurah di kawasan Sirimau misalnya, menjelaskan bahwa meskipun ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Ia mencontohkan bahwa pelatihan gizi yang terlalu teoritis dan disampaikan dalam Bahasa Indonesia formal seringkali tidak efektif bagi ibu-ibu muda yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Oleh karena itu, ia meminta kader untuk menerjemahkan kembali materi pelatihan ke dalam bahasa lokal yang lebih akrab dan mudah dipahami. Praktik ini menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan tidak hanya bersifat hierarkis dan prosedural, tetapi juga merupakan ruang interaksi dan interpretasi di mana aktor lokal melakukan penyesuaian sebagai bentuk policy localization.

Observasi lapangan juga memperlihatkan bahwa sebagian besar kelurahan mengalami keterbatasan dalam hal jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi program. Banyak staf kelurahan yang harus merangkap tugas, dari urusan administrasi umum hingga mendampingi program stunting. Kondisi ini diperparah dengan tidak meratanya pelatihan teknis yang seharusnya diberikan secara berkala. Di salah satu kelurahan yang dikunjungi, tercatat hanya dua orang staf yang memahami indikator stunting secara detail, sedangkan yang lain bergantung pada arahan dari pihak puskesmas. Situasi ini memperkuat argumen bahwa capacity constraints merupakan salah satu hambatan paling signifikan dalam menjembatani antara kebijakan dengan pelaksanaannya (Wang & Ran, 2023).

Implementasi kebijakan stunting di Kota Ambon memperlihatkan bahwa niat baik pemerintah tidak secara otomatis tertransformasi menjadi hasil yang efektif tanpa adanya koordinasi yang solid, harmonisasi data, serta adaptasi kontekstual. Ketegangan yang terjadi bukan sekadar cerminan kelemahan teknis, tetapi bagian dari dinamika yang wajar dalam tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan, kapasitas, dan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lokal, penciptaan ruang dialog lintas sektor, serta pengakuan terhadap pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan menjadi kunci penting dalam menjembatani jurang antara niat kebijakan dan realitas lapangan.

Menuju Model Kolaborasi dan Komunikasi yang Kontekstual dan Replikatif

Menuju akhir dari kajian ini, implementasi kebijakan penanganan stunting di Kota Ambon membuka ruang refleksi penting tentang bagaimana sebuah model kolaborasi dan komunikasi yang kontekstual dapat tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga menyajikan potensi untuk direplikasi di wilayah lain yang memiliki struktur sosial serupa. Kota Ambon, sebagai kota urban yang kompleks namun masih mengakar kuat dalam struktur sosial komunal dan lembaga adat, memperlihatkan bahwa tata kelola kesehatan yang efektif tidak selalu bersandar pada pendekatan teknokratik semata. Sebaliknya, keberhasilan program sangat bergantung pada sensitivitas terhadap konteks lokal—baik dalam dimensi kultural, sosial, maupun kekuasaan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh

Sørensen & Torfing (2019), bahwa intervensi kebijakan publik di wilayah urban Global South harus dilandaskan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika lokal dan tidak hanya mengadopsi model-model institusional dari negara-negara Barat.

Salah satu pelajaran kunci dari praktik di Ambon adalah keberhasilan menggabungkan relasi formal-informal dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam berbagai wawancara, beberapa kepala kelurahan dan tokoh masyarakat adat menjelaskan bagaimana forum musyawarah lokal digunakan tidak hanya untuk menyosialisasikan program, tetapi juga sebagai mekanisme internal untuk menyesuaikan bentuk intervensi dengan nilai-nilai budaya. Seorang kepala RT di kawasan Nusaniwe, misalnya, menyebut bahwa pendekatan "sapa basudara" menjadi kunci dalam mendekati keluarga-keluarga muda yang anaknya terindikasi stunting. Ia tidak serta-merta membawa pesan dari dinas kesehatan dalam format formal, tetapi terlebih dahulu menjalin relasi emosional melalui silaturahmi dan obrolan santai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak semata soal penyampaian informasi, tetapi juga soal penciptaan rasa percaya dan kepemilikan bersama.

Observasi lapangan memperkuat temuan ini. Di beberapa kelurahan seperti Batu Meja dan Silale, misalnya, posyandu rutin menjadi ruang interaksi sosial yang tidak hanya dihadiri oleh kader dan petugas puskesmas, tetapi juga oleh tokoh adat dan tokoh agama setempat. Dalam salah satu kegiatan, terlihat jelas bagaimana seorang tokoh gereja mengambil peran aktif dalam menjelaskan pentingnya gizi seimbang kepada para ibu—bukan dengan narasi teknis medis, tetapi dengan pendekatan moral dan spiritual yang lebih resonan dengan keseharian warga. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial lokal bukanlah penghalang modernisasi kebijakan, melainkan justru aset dalam memperluas daya jangkau dan legitimasi program. Seperti dikemukakan dalam studi Southern urbanism, kolaborasi semacam ini mencerminkan bentuk tata kelola kota yang khas di selatan dunia, di mana struktur informal dan praktik sosial yang berakar menjadi bagian integral dari kerja institusional (Bianchi et al., 2021; Wang & Ran, 2023).

Penguatan peran lembaga adat dalam kebijakan kesehatan menjadi salah satu rekomendasi strategis yang muncul dari kajian ini. Praktik-praktik seperti masohi (kerja kolektif sukarela), pela-gandong (ikatan antar-komunitas), hingga keterlibatan raja negeri dalam sosialisasi program stunting merupakan bukti bahwa modal sosial lokal dapat diintegrasikan dalam desain dan pelaksanaan kebijakan publik. Seorang pejabat dinas kesehatan Kota Ambon bahkan mengakui bahwa keterlibatan tokoh adat dalam beberapa wilayah justru mempermudah akses ke rumah tangga yang sebelumnya tertutup terhadap intervensi pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun di atas fondasi nilai lokal memiliki keunggulan tersendiri dibanding pendekatan top-down yang bersifat homogen dan birokratis.

Lebih jauh lagi, model Ambon memberikan kontribusi empiris yang penting bagi literatur tentang Southern urban governance. Literatur ini masih dalam proses berkembang dan sering kali kekurangan contoh konkret dari praktik tata kelola kesehatan yang berbasis pada realitas sosiokultural kota-kota kecil dan menengah di Asia Tenggara. Sebagaimana

ditegaskan oleh Mansoor (2021), kebijakan kesehatan di kawasan Global South seringkali berhasil bukan karena ketepatan desain institusionalnya, melainkan karena kemampuan lokal dalam membangun ruang-ruang negosiasi yang lentur, informal, dan berjejaring. Dalam konteks itu, Ambon memberikan preseden positif bahwa keberhasilan program nasional seperti penurunan stunting tidak harus dibebankan sepenuhnya pada kapasitas birokrasi, melainkan bisa didorong melalui penguatan kolaborasi dengan entitas sosial-budaya yang telah eksis dan dihormati masyarakat.

Praktik Kota Ambon menyodorkan sebuah pelajaran berharga: bahwa dalam konteks kebijakan publik di wilayah urban yang majemuk dan komunal, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas intervensi teknis, tetapi lebih dalam lagi oleh kepekaan terhadap lanskap sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan komunikatif yang kontekstual harus diposisikan sebagai arus utama dalam pembangunan kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Kota-kota lain di Indonesia, khususnya yang memiliki karakter sosial serupa—seperti Jayapura, Kupang, atau Ternate—berpotensi mereplikasi model ini dengan penyesuaian lokal masing-masing. Yang dibutuhkan bukan hanya adopsi program, tetapi juga pemahaman terhadap cara kerja sosial di balik keberhasilan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Ambon dalam pencegahan stunting tidak semata-mata bertumpu pada kekuatan kebijakan teknokratik, melainkan dibangun melalui praktik collaborative governance yang kontekstual dan komunikatif. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan Ambon terletak pada kemampuannya mengorkestrasi berbagai aktor lintas sektor—mulai dari BKKBN, dinas kesehatan, negeri adat, hingga LSM—ke dalam jejaring tata kelola yang cair, fleksibel, namun terkoordinasi, di mana relasi kuasa dan legitimasi sosial ditransformasikan menjadi modal untuk keberlanjutan program. Komitmen politik lokal yang tercermin dalam alokasi anggaran yang terarah memperkuat posisi pemerintah kota sebagai simpul integratif, bukan dominatif. Selain itu, pendekatan komunikasi strategis yang dijalankan tidak berhenti pada level informasi, tetapi juga menjangkau aspek afeksi dan kultural masyarakat melalui media luar ruang dan forum komunitas yang bersifat partisipatif. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan stunting di Ambon tidak hanya dihasilkan oleh kapasitas institusional, tetapi oleh kecerdasan sosial dan politik dalam membaca lanskap lokal serta merancang intervensi yang relevan dan inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan sosiologi politik dalam menganalisis tata kelola kesehatan mampu membuka ruang konseptual baru, di mana kebijakan publik dilihat sebagai hasil dari negosiasi kekuasaan, identitas kolektif, dan praktik komunikasi yang tersemat dalam struktur sosial lokal—sebuah perspektif yang masih jarang muncul dalam literatur tata kelola urban di kawasan Indonesia Timur maupun Global South secara lebih luas.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adriany, V., & Tesar, M. (2023). Unpacking the discourses of stunting in Indonesian early childhood education and parenting. *Children & Society*, *37*(2), 311–325. https://doi.org/10.1111/chso.12593

Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *Public Administration*, *101*(1), 3–22. https://doi.org/10.1111/padm.12874

Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Co-creation: the new kid on the block in public governance. *Policy & Politics*, *49*(2), 211–230. https://doi.org/10.1332/030557321X16115951196045

Assegaff, S. B., Liliweri, A., & Seran, A. (2023). The Importance of Persuasion Strategies in Doctors' Social Media Messages. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, *4*(6), 1835–1846. https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i6.914

Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, *23*(11), 1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777

Bleiker, J., Morgan-Trimmer, S., Knapp, K., & Hopkins, S. (2019). Navigating the maze: Qualitative research methodologies and their philosophical foundations. *Radiography*, *25*, S4–S8. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.06.008

Burdine, J. T., Thorne, S., & Sandhu, G. (2021). Interpretive description: A flexible qualitative methodology for medical education research. *Medical Education*, *55*(3), 336–343. https://doi.org/10.1111/medu.14380

Candarmaweni, & Yayuk Sri Rahayu, A. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. *E3S Web of Conferences*, *211*(12), 01014. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014

Cuthbertson, L. M., Robb, Y. A., & Blair, S. (2020). Theory and application of research principles and philosophical underpinning for a study utilising interpretative phenomenological analysis. *Radiography*, *26*(2), e94–e102. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.11.092

de Villiers, C., Farooq, M. B., & Molinari, M. (2022). Qualitative research interviews using online video technology – challenges and opportunities. *Meditari Accountancy Research*, *30*(6), 1764–1782. https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2021-1252

Diana, R., Rachmayanti, R. D., Khomsan, A., & Riyadi, H. (2022). Influence of eating concept on eating behavior and stunting in Indonesian Madurese ethnic group. *Journal of Ethnic Foods*, *9*(1), 48. https://doi.org/10.1186/s42779-022-00162-3

Ding, W., Liang, X., Hou, J., Li, J., Rouabah, Y., Yuan, Y., & Wang, F.-Y. (2023). A Novel Approach for Predictable Governance of Decentralized Autonomous Organizations Based on Parallel Intelligence. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *53*(5), 3092–3103. https://doi.org/10.1109/TSMC.2022.3224250

Fristiwi, P., Nugraheni, S. A., & Kartini, A. (2023). Effectiveness of Stunting Prevention Programs in Indonesia : A Systematic Review. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, *9*(12), 1262–1273. https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i12.5850

Getha-Taylor, H., Grayer, M. J., Kempf, R. J., & O'Leary, R. (2019). Collaborating in the Absence of Trust? What Collaborative Governance Theory and Practice Can Learn From the Literatures of Conflict Resolution, Psychology, and Law. *The American Review of Public Administration*, *49*(1), 51–64. https://doi.org/10.1177/0275074018773089

Jandevi, U. (2019). Communication strategy to improve women's political participation in Indonesia. *International Journal of Communication and Society*, *1*(2), 68–81. https://doi.org/10.31763/ijcs.v1i2.46

Kusuma, A., Lestari, P., & Sosiawan, E. A. (2023). Persuasive communication model of the "Satuan Gugus Tugas" Pandemic (A case study of the "SATGAS COVID-19" in Yogyakarta). *International Journal of Communication and Society*, *5*(2), 48–59. https://doi.org/10.31763/ijcs.v5i2.1226

Magrath, P., & Nichter, M. (2023). Moral framing in health promotion: lessons from an Indonesian case study. *Global Health Promotion*, *30*(2), 19–27. https://doi.org/10.1177/17579759221112559

Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, *38*(4), 101597. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597

Muhtar, M., Pudjianto, B., & Habibullah, H. (2022). Social approach to stunting prevention in Blora, Central Java, Indonesia. *Simulacra*, *5*(2), 13–28. https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.15909

Müller, R. (2022). Governance, governmentality and project performance: the role of sovereignty. *International Journal of Information Systems and Project Management*, *7*(2), 5–17. https://doi.org/10.12821/ijispm070201

Murtadho, F. (2022). The effects of using mother tongue in delivering health protocol messages on health attitudes and behaviors: Do gender, age, and education level make any difference? *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, *12*(2), 348–360. https://doi.org/10.17509/ijal.v12i2.46941

Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*(1), 1–10. https://doi.org/10.1177/16094069231205789

Noventi, I. A. (2020). East Java Provincial Government Strategy in Improving Community

Nutrition to Reduce Stunting Prevalence. *Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)*, 1–10. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.050

Panjaitan, N., Sihombing, S., Palen, K., Schiavo, R. B., & Lipschultz, L. (2023). Enhancing Government Communication Strategies for Effective Health In-formation and Public Health Education. *Law and Economics*, *17*(2), 151–169. https://doi.org/10.35335/laweco.v17i2.6

Partelow, S., Schlüter, A., Armitage, D., Bavinck, M., Carlisle, K., Gruby, R. L., Hornidge, A.-K., Le Tissier, M., Pittman, J. B., Song, A. M., Sousa, L. P., Văidianu, N., & Van Assche, K. (2020). Environmental governance theories: a review and application to coastal systems. *Ecology and Society*, *25*(4), art19. https://doi.org/10.5751/ES-12067-250419

Permatasari, A., Sofyan, N., & Walinegoro, B. G. (2022). Stunting Prevention Through Collaborative Governance in the Berbah Sub-district, Sleman. In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)* (pp. 618–628). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_51

Permatasari, A., & Walinegoro, B. G. (2023). Collaborative Governance in Realizing Smart Society as a Sustainable Stunting Reduction Effort in Sleman Regency. *E3S Web of Conferences*, *440*, 01010. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344001010

Prasetyo, A., Noviana, N., Rosdiana, W., Anwar, M. A., Hartiningsih, Hendrixon, Harwijayanti, B. P., & Fahlevi, M. (2023). Stunting Convergence Management Framework through System Integration Based on Regional Service Governance. *Sustainability*, *15*(3), 1821. https://doi.org/10.3390/su15031821

Rahayu, I., Musthofa, S. B., & Kartini, A. (2022). Interpersonal Communication Strategy (ICS) in Overcoming Stunting : A Review. *International Journal of Health, Education & Social (IJHES)*, *5*(7), 43–54. https://doi.org/10.1234/ijhes.v5i7.253

Rahmawati, D., Prayitno, H. J., Huda, M., & Rahmawati, L. E. (2022). Implicature of Public Service Advertising Discourse and Pragmatic Implications on Electronic Media. *Proceedings of the International Conference of Learning on Advance Education (ICOLAE 2021)*, 30–48. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220503.014

Rosalia, F., Yulianto, Kartika, T., & Wulandari, J. (2022). Actor's Network of Stunting Prevention Program in Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia. *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, 1–10. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.016

Rose, J., & Johnson, C. W. (2020). Contextualizing reliability and validity in qualitative research: toward more rigorous and trustworthy qualitative social science in leisure research. *Journal of Leisure Research*, *51*(4), 432–451. https://doi.org/10.1080/00222216.2020.1722042

Saputri, R. A., Anggraeni, D., Sujadmi, & Sopamena, N. (2020). Environmental Sanitation and Stunting (Study of the Role of Women in Stunting Intervention). *Journal of Physics: Conference Series*, *1655*(1), 012083. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1655/1/012083

Sarkodie, S. A., Adams, S., & Leirvik, T. (2020). Foreign direct investment and renewable energy in climate change mitigation: Does governance matter? *Journal of Cleaner Production*, *263*, 121262. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121262

Sitaresmi, M. N., Arjuna, T., Helmyati, S., Santosa, B., & Supriyati, S. (2023). Engaging stakeholders to strengthen the local actions for stunting prevention and control in Lombok Barat. *Journal of Community Empowerment for Health*, *6*(1), 52. https://doi.org/10.22146/jcoemph.80762

Solihin, O., Yasundari, Y., Zakki Abdullah, A., Devi Purnamasari, K., Irfan, M., & Mogot, Y. (2024). Social and Behavior Change Communication Framework. In *Oxytocin and Social Function* (pp. 1–10). IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.112744

Sørensen, E., & Torfing, J. (2019). Designing institutional platforms and arenas for interactive political leadership. *Public Management Review*, *21*(10), 1443–1463. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1559342

Suharto, A., Wildan, M., & Handayani, T. E. (2020). Development of Stunting Prevention Behavior Model Based on Health Promotion Model and Social Capital in The Magetan District. *Health Notions*, *4*(2), 48–56. https://doi.org/10.33846/hn40204

Susanti, H., James, K., Utomo, B., Keliat, B., Lovell, K., Irmansyah, I., Rose, D., Colucci, E., & Brooks, H. (2020). Exploring the potential use of patient and public involvement to strengthen Indonesian mental health care for people with psychosis: A qualitative exploration of the views of service users and carers. *Health Expectations*, *23*(2), 377–387. https://doi.org/10.1111/hex.13007

Suwarta, N., Astutiek, D., Riyanto, E. D., Fradana, A. N., Susilo, J., & Puspita, Y. M. (2023). Understanding the Role of the Environmental Arena and Community Social Structure in Stunting Prevention Education. *Academia Open*, *8*(2), 255–265. https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.8667

Termeer, C. J. A. M., Dewulf, A., & Biesbroek, R. (2019). A critical assessment of the wicked problem concept: relevance and usefulness for policy science and practice. *Policy and Society*, *38*(2), 167–179. https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1617971

Torfing, J., Ferlie, E., Jukić, T., & Ongaro, E. (2021). A theoretical framework for studying the co-creation of innovative solutions and public value. *Policy & Politics*, *49*(2), 189–209. https://doi.org/10.1332/030557321X16108172803520

Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: a thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, *25*(6), 1187–1211. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389

Yuniar, A. D., & Fibrianto, A. S. (2019). Public Health Communication Campaign 'Germas' by Ministry of Health in Maluku 2018: An overview. *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 11–18. https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.33